



Sekitar 3.000 Kegiatan Ditiadakan

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan sekitar 3.000 kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun ini akan dihilangkan. Kegiatan itu dihapuskan sama sekali, ditunda tahun depan, atau dievaluasi nilainya.

"Biar saja (ditiadakan) daripada boros tidak karuan. Kamu bayangkan, (pembangunan) GOR Pancoran anggarannya Rp 48 miliar. Setelah saya minta hitung ulang dengan benar harga satuannya, ternyata biayanya cuma Rp 35 miliar. Ada selisih Rp 13 miliar, bagaimana bisa dilelang?" kata Basuki, Selasa (30/6), di Balai Kota Jakarta.

Dia menilai, banyak kegiatan yang berlebihan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, desain gedung olahraga yang masif dengan semen dan kaca. Basuki menghendaki desain yang lebih sederhana, tetapi fasilitasnya lengkap dan fungsinya berjalan baik.

Menurut dia, lebih baik menunda pembangunan tahun depan dengan anggaran yang lebih realistis dan bangunan yang lebih fungsional. Demikian pula pembelian bus untuk armada transjakarta. Dia menghendaki agar

bus berasal dari produsen yang jelas dan berkelas dunia.

"Lebih baik saya tunda. Hanya memang jeleknya penyerapan anggaran menjadi kecil. Tetapi, peduli amat dengan penilaian orang. Yang penting orang Jakarta dapat bus yang hebat," ujar Basuki.

Tidak akan selesai

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, bisa jadi lebih dari 3.000 kegiatan pengadaan barang dan jasa dihapuskan tahun ini, termasuk pengadaan yang terhitung kecil.

Misalnya, pembelian penyejuk ruangan untuk kantor kelurahan atau kecamatan dan pembelian mobil bak terbuka untuk kelurahan. "Saya minta ditunda tahun depan saja karena belum sangat diperlukan," kata Heru.

Sejumlah kegiatan pembangunan, seperti pembangunan dan rehabilitasi beberapa kantor kelurahan, kecamatan, dan GOR, juga diabaikan. Selain dihitung ulang anggarannya, pembangunan dan rehabilitasi tersebut diperkirakan tidak akan selesai sampai akhir tahun anggaran 2015.

Meskipun ribuan kegiatan pengadaan barang dan jasa dihilangkan, Heru telah meminta satuan kerja terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kegiatan perbaikan jalan, jembatan, dan saluran air harus tetap berjalan. Untuk rehabilitasi gedung sekolah tidak diabaikan, tetapi tetap dihitung ulang nilainya," tutur Heru.

Rehabilitasi dan pembangunan sejumlah rumah sakit, antara lain di Koja, tetap berjalan. Begitu juga dengan penambahan fasilitas rumah sakit, seperti tempat tidur untuk RSUD Cengkareng, juga tetap diadakan.

Heru menambahkan, penghilangan ribuan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini berpengaruh pada kinerja aparat dan pembangunan di DKI Jakarta. "Dana hasil efisiensi berikut kegiatan yang masih bisa dilakukan bisa dialihkan ke Perubahan APBD. Misalnya, di satu dinas semula 10 kegiatan, ternyata dia melapor hanya bisa melakukan lima kegiatan. Nanti tinggal dilihat saja apakah di akhir tahun anggaran lima kegiatan itu bisa terlaksana. Dari situ terlihat kinerjanya," katanya. (FRO)